BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat bagi investor untuk mengetahui kondisi perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Selain itu laporan keuangan juga memiliki berbagai kegunaan tergantung penggunaannya. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi agar laporan keuangan dapat tersaji dengan relevan dan dapat diandalkan sehingga bermanfaat bagi para penggunaannya. Standar akuntansi menetapkan aturan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi tidak hanya harus dipahami pihak yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan, namun juga harus dipahami oleh pembaca laporan keuangan supaya pembaca dapat memahami makna angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

International Financial reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (*revaluation*) profesional dengan *disclosures* yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Penggunaan standar internasional yang berlaku sama di semua negara tentu memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perusahaan pada lebih dari 100 negara telah mengadopsi

International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai standar laporan keuangan mereka.

Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Ada yang perubahannya besar sampai harus melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis perusahaan, namun ada juga perubahan yang hanya terkait dengan prosedur akuntansi (Kurniawati, 2013).

Perbankan, termasuk yang memiliki dampak perubahan cukup banyak terkait dengan IFRS dan dibahas dalam IAS 39 mengenai *financial instrument recognition and measurement*. Dampak utama dari PSAK 50/55 (revisi 2006) adalah dalam valuasi pencadangan kredit bermasalah dimana penekanannya adalah pada objektivitas dalam menentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari kredit yang diberikan harus berdasarkan data historis 3 tahun ke belakang, dan juga adanya keharusan valuasi debitur secara individual. Sebelumnya perhitungan CKPN berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dimana terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria penentuan kualitas kredit beserta persentase pencadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing klasifikasi kualitas kredit, bila diterapkan dengan benar maka penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) akan meningkatkan akurasi dan keinformatifan CKPN (Anggraita, 2012).

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat dikenal masyarakat. Bank menjadi penggerak dan pendorong perekonomian suatu

negara. Kondisi keuangan bank menjadi sorotan penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang berwenang dalam membuat standar akuntansi di Indonesia telah melakukan langkah-langkah penyeragaman standar akuntansi keuangan. Sejak tahun 1994, IAI telah melaksanakan program harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi internasional dalam rangka pengembangan standar akutansinya. IAI pada Desember 2008 telah mengumumkan rencana konvergensi standar akuntansi lokalnya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan PSAK 55 (revisi 2006) kemudian telah diperbaharui menjadi PSAK 55 (revisi 2011) mengenai Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 (revisi 2011) merupakan standar akuntansi yang mengacu pada *International Financial Reporting Standard* dan dibahas dalam *International Accounting Standards* (IAS) 39 mengenai *financial instrument recognition and measurement*. PSAK 55 (revisi 2011) merupakan standar akuntansi yang cukup kompleks karena berupaya mengakomodasi kebutuhan pengaturan instrumen keuangan yang berkembang pesat.

Reaksi terhadap pemberlakuan PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan masih terus muncul. Para bankir mempermasalahkan dampak PSAK 55 (revisi 2006) terhadap rasio-rasio keuangan bank dan menganggap penerapan PSAK 55 (revisi 2006) dapat berdampak pada kapital dan aset, namun masih dalam tahap mengkaji dampak penerapan secara keseluruhan terhadap bank. Selain itu, PSAK 55 (revisi 2011) yang merupakan revisi dari PSAK 55 (revisi 2006) juga mengalami perubahan. Salah satu perubahannya adalah pengakuan klasifikasi aset keuangan. PSAK 55 (revisi 2011) membagi keuangan menjadi empat klasifikasi yaitu: aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan atau piutang, dan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pada kategori pinjaman dan piutang bisa terjadi penurunan nilai yang diatur pada PSAK 55 (revisi 2011) karena beberapa hal seperti nilai tercatat atau biaya perolehan yang diamortisasi lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Dasar pengukurannya yang dilakukan pada PSAK 55 (revisi 2011) dengan menggunakan nilai wajar bukan lagi biaya historis.

Hal-hal itulah yang merupakan alasan industri perbankan Indonesia mengalami kesulitan menerapkan PSAK 55 (revisi 2006) sehingga pada awal pengadopsian IFRS, Bank Indonesia mengizinkan tanggal efektif pemberlakuan PSAK 55 (revisi 2006) yaitu 1 Januari 2009 diubah menjadi 1 Januari 2010. Sekalipun demikian, tidak dapat dipungkiri banyak manfaat dan kelebihan

implementasi PSAK 55 (revisi 2006). Manfaat dan kelebihan tersebut antara lain dengan adanya standar akuntansi Indonesia yang mengacu pada standar internasional ini, akan meningkatkan keandalan, keterbandingan, dan *representative faithfulness*, serta peningkatan transparansi terhadap pelaporan keuangan bank (Kurniawati, 2013).

Dalam penelitian Secarian dan Kiswara (2012) yang berjudul “Evaluasi Penerapan PSAK 55 Mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran pada Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan, Perlakuan Akuntansi, dan Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada PT. ABC Ventura)”, menyatakan perusahaan sudah lebih condong menggunakan PSAK 55 (revisi 2011) dengan baik agar dapat memberikan efek baik kepada investor ataupun masyarakat. Nilai perusahaan mengalami kenaikan berdasarkan laporan keuangan 2007-2011 hanya saja terjadi penurunan pada tahun 2008. Cadangan kecukupan penurunan nilai memiliki pengaruh dalam besaran laba perusahaan, jika cadangan kecukupan penurunan nilai tinggi akan menyebabkan laba perusahaan turun dan nilai perusahaan rendah.

Dalam penelitian Febrianti (2012), menyatakan pengakuan dan pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang diterapkan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk telah sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Proses pengakuan CKPN oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan suku bunga efektif awal instrumen, serta mempertimbangkan seluruh eksposur pinjaman yang diberikan, bukan

hanya yang berkualitas rendah dalam proses estimasi terhadap penurunan nilai sedangkan pada proses pengukuran CKPN oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., aset keuangan dievaluasi secara kolektif diukur berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami perusahaan, yaitu membandingkan tingkat kerugian historis aset keuangan tersebut dengan tingkat kerugian historis dengan aset serupa yang telah diobservasi.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih banyak membahas secara terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam PSAK 55 dengan menggunakan metode kualitatif. Namun masih jarang penelitian yang membahas penerapan PSAK 55 dengan menggunakan metode kuantitatif untuk melihat perbandingan terhadap rasio-rasio keuangan perbankan tertentu sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 pada perbankan di Indonesia. Rasio-rasio keuangan perbankan penting guna untuk mengetahui kinerja perbankan, posisi perbankan di tengah perbankan lainnya, dan memudahkan untuk memprediksi trend perbankan di masa akan datang (Analisis Rasio Keuangan, 2011).

Dalam penelitian Kurniawati (2013) yang berjudul Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 55 pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 4 rasio yaitu NPL (*Non Performing Loan*), ROA (*Return On Assets*), BOPO (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) sesudah penerapan PSAK 55,

Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas perbedaan atau perbandingan rasio keuangan perbankan saat sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 55 sehingga memutuskan mengambil judul **“Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- (a) Apakah terdapat perbedaan *Current Ratio* (CR) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013?
- (b) Apakah terdapat perbedaan *Quick Ratio* (QR) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013?
- (c) Apakah terdapat perbedaan *Cash Ratio* (CR) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013?

- (d) Apakah terdapat perbedaan *Total Debt to Equity Ratio* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013?
- (e) Apakah terdapat perbedaan *Total Debt to Total Assets Ratio* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2013?
- (f) Apakah terdapat perbedaan *Return On Assets (ROA)* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2013?
- (g) Apakah terdapat perbedaan yang *Net Profit Margin (NPM)* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2013?
- (h) Apakah terdapat perbedaan *Return On Common Equity* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2013?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Maksud penelitian: yaitu membandingkan rasio keuangan sebelum dan sesudah penerapan (revisi 2011) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.

- (b) Tujuan penelitian: yaitu menemukan dan menganalisis bukti empiris apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio keuangan sesudah penerapan PSAK 55.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Bagi Perbankan

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi perbankan untuk meninjau kinerja keuangannya berdasarkan rasio keuangan dan mengkaji penerapan PSAK 55 yang berlaku di Indonesia.

- (b) Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi dan perbankan.